

Analisis pembiayaan publik untuk program penanggulangan tuberkulosis di Kab. Solok Selatan tahun 2004-2006

Itidalina

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=53154&lokasi=lokal>

Abstrak

Sampai saat ini masalah tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Dari segi pendanaan, program penanggulangan tuberkulosis belum mendapat perhatian yang memadai. Pembiayaan tuberkulosis semakin bervariasi antar daerah. Sumber pembiayaan masih didominasi oleh bantuan luar negeri. Pemberlakuan otonomi daerah memberi peluang kepada kepala daerah dalam menyusun perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah. Peran kepala daerah dan komitmen para policymakers (pengambil kebijakan) sangat besar dalam pengalokasian anggaran program tuberkulosis yang berasal dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peta pembiayaan program tuberkulosis di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2004 - 2006. Penelitian ini juga melihat komitmen pengambil kebijakan dan peran mereka dalam menetapkan anggaran. Jika dilihat dari elemen kegiatan menunjukkan sebagian besar dana dialokasikan untuk gaji personil program tuberkulosis yaitu Rp 35.653.478,- (37,5%) tahun 2004 menjadi Rp 52.926.516,- (36,72%) tahun 2006. Berdasarkan fungsi program diluar perhitungan gaji, program kuratif mendapat alokasi terbesar antara Rp 46.181.665,- (77,6%) pada 2004 sampai Rp 62.822.458,- (68,88%) tahun 2006. Sedangkan jika dilihat dari fungsi pelayanan program personal care mendapat alokasi tertinggi masing-masing Rp 46.181.665,- (77,6%) tahun 2004, Rp 64.940.610,- (68,7%) tahun 2005 dan Rp 62.822.458,- (68,9%) pada tahun 2006. Menurut estimasi kebutuhan anggaran KW-SPM, pembiayaan program tuberkulosis adalah Rp 445.544.336,- sementara alokasi anggaran yang tersedia pada tahun 2006 adalah Rp 144.131.474,-. Terdapat gap yang sangat besar antara alokasi dan kebutuhan biaya program tuberkulosis yang normatif. Komitmen para pengambil kebijakan dalam pengalokasian dana untuk program tuberkulosis baru sebatas wacana namun masih lemah penempatan dalam pengalokasian dana. Agar pengalokasian pembiayaan tuberkulosis sesuai dengan kebutuhan, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan advokasi dengan pengambil kebijakan (policymakers).

At present, tuberculosis (TB) still becomes a major health problem in Indonesia. From the financial aspect, little attention has been given for TB programs. There are huge variety in TB funding across region. Major funding for TB is dominated by donors (loan). The implementation of regional autonomy has provided district head an opportunity to plan, finance and undertake health development in region. Role and commitment of policymakers are very significant in allocating budget from the Central Government for TB programs. This research is aimed at studying financial map of TB programs in South Solok Regency from 2004 to 2006. The research also wants to see commitment and role of policymakers in determining budget for funding TB programs. This is operational research. Data used are primary and secondary. Secondary data were analyzed by document analysis, while primary data were analyzed by content analysis. The result show that funding for TB programs in South Solok Regency comes from some sources, that are Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD), National Revenues and Expenditure Budget (APBN), and BLN. Total budget for funding TB programs tends to increase from IDR95,160,143 (2004) to IDR144,131,474 (2006).